

## Mitigasi Konflik Bernuansa Politik Identitas melalui Diskusi Tata Kelola Keragaman dalam Menghadapi Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2024

Muhammad Ansor<sup>1\*</sup>, Bambang Hermanto<sup>2</sup>, Laila Sari Masyhur<sup>3</sup>, Saiman Pakpahan<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Universitas Riau, Riau, Indonesia<sup>4</sup>



Email Korespodensi: [ansor@uin-suska.ac.id](mailto:ansor@uin-suska.ac.id)

### INFO ARTIKEL

#### Histori Artikel:

Diterima 01-07-2026

Disetujui 08-07-2026

Diterbitkan 10-07-2026

#### Katakunci:

politik identitas;  
mitigasi konflik;  
tata kelola keragaman;

### ABSTRAK

Politik identitas menjadi salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan demokrasi lokal karena berpotensi memicu polarisasi dan konflik sosial, terutama pada masyarakat yang majemuk seperti Riau. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesepahaman timbal balik antara aktor civil society berbasis sosial keagamaan tentang tata kelola keragaman sebagai strategi mitigasi konflik bernuansa politik identitas menjelang Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2024. Kegiatan ini menggunakan pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD). Partisipan kegiatan adalah perwakilan organisasi sosial keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan paguyuban etnis di Riau yang berperan sebagai simpul sosial dalam menjaga kerukunan masyarakat. Metode pelaksanaan meliputi ceramah interaktif, diskusi partisipatif, studi kasus, serta penyusunan komitmen bersama untuk memperkuat kohesi sosial. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman partisipan mengenai bahaya eksploitasi politik identitas, serta perlunya kolaborasi lintas organisasi dalam membangun budaya demokrasi yang inklusif. Pengabdian ini menegaskan bahwa penguatan literasi tata kelola keragaman berbasis aset komunitas mampu memperkuat kapasitas masyarakat dalam mencegah konflik sosial serta mendukung penyelenggaraan Pilkada yang damai, demokratis, dan berintegritas.

### Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Ansor, M., Hermanto, B., Masyhur, L. S., & Pakpahan, S. (2026). Mitigasi Konflik Bernuansa Politik Identitas melalui Diskusi Tata Kelola Keragaman dalam Menghadapi Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2024. *Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(4), 1980-1993. <https://doi.org/10.63822/yfr6yb38>

## **PENDAHULUAN**

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan instrumen utama demokrasi lokal yang memungkinkan masyarakat menentukan pemimpin daerah secara langsung (Rofieq & Nuryono, 2016). Melalui mekanisme tersebut, prinsip kedaulatan rakyat diwujudkan dalam proses pergantian kepemimpinan yang diharapkan berlangsung secara demokratis, jujur, adil, dan damai. Namun demikian, pengalaman demokrasi elektoral di Indonesia menunjukkan bahwa kontestasi politik tidak selalu berlangsung dalam ruang kompetisi yang sehat (Ansor, 2024b; Muhtadi, 2021; Mujani et al., 2012). Dinamika politik sering kali diwarnai oleh mobilisasi sentimen identitas berbasis agama, etnis, ras, maupun kelompok sosial tertentu yang digunakan sebagai strategi memperoleh dukungan politik (Putrie et al., 2020). Politik identitas yang pada mulanya merupakan bentuk ekspresi identitas kelompok berkembang menjadi instrumen politik yang berpotensi menciptakan polarisasi sosial, memperkuat prasangka antarkelompok, serta meningkatkan risiko konflik horizontal (Mujani, 2020).

Fenomena tersebut menjadi perhatian serius dalam perkembangan demokrasi Indonesia pascareformasi (Mujani, 2008; Mujani et al., 2018). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa politik identitas semakin menguat pada momentum elektoral, terutama sejak Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 dan Pemilihan Presiden 2019 (Ahyar, 2017; Akmaliah, 2020; Hadiz, 2019; Lim, 2013; Osman & Waikar, 2018). Politik identitas tidak lagi terbatas pada penguatan identitas kelompok sendiri, tetapi berkembang menjadi praktik delegitimasi kelompok lain melalui penggunaan simbol keagamaan, etnisitas, maupun narasi moral untuk membangun preferensi politik masyarakat (Ansor, 2016; Appiah, 1994; Calhoun, 1994; Fraser, 2003; Heryanto, 2014). Kondisi tersebut menyebabkan ruang demokrasi lebih banyak dipenuhi oleh sentimen emosional dibandingkan pertarungan gagasan dan program pembangunan. Penelitian mengenai politik identitas dalam kontestasi politik Indonesia menunjukkan bahwa penggunaan simbol agama dan narasi provokatif telah menjadi strategi politik yang efektif dalam memobilisasi pemilih, tetapi pada saat yang sama memperbesar potensi polarisasi dan konflik sosial (Sumaktoyo, 2021).

Dalam perspektif sosiologi politik, politik identitas menjadi ancaman ketika identitas kolektif dimanfaatkan sebagai instrumen eksklusivitas yang membedakan kelompok "kami" dan "mereka" (Ansor, 2014; Zulkarnaini et al., 2022). Identitas yang seharusnya menjadi modal sosial justru berubah menjadi sumber fragmentasi masyarakat. Polarisasi yang dibangun melalui media sosial mempercepat penyebaran stereotip, ujaran kebencian, disinformasi, serta hoaks yang memperkuat prasangka antarkelompok. Akibatnya, masyarakat tidak lagi menilai kandidat berdasarkan kapasitas, integritas, maupun visi pembangunan, melainkan berdasarkan kesamaan identitas primordial. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi deliberatif yang mengedepankan rasionalitas publik dalam pengambilan keputusan politik.

Provinsi Riau merupakan salah satu wilayah dengan tingkat keragaman sosial yang tinggi (Ansor & Darwis, 2006; Khotimah & Rosidi, 2020). Komposisi penduduk Riau terdiri atas berbagai etnis seperti Melayu, Minangkabau, Jawa, Batak, Bugis, Tionghoa, dan kelompok etnis lainnya yang hidup berdampingan dengan latar belakang agama, budaya, serta kepentingan sosial-ekonomi yang beragam (Ansor & Masyhur, 2023; Azhar et al., 2008; Masyhur et al., 2024; Porath, 2001; Wee & Chou, 1997). Keberagaman tersebut merupakan modal sosial yang penting bagi pembangunan daerah, tetapi pada saat yang sama dapat menjadi titik rawan apabila dimanfaatkan sebagai alat mobilisasi politik. Dalam situasi

kompetisi elektoral, identitas etnis maupun agama berpotensi digunakan untuk membangun loyalitas politik yang bersifat eksklusif sehingga memunculkan segregasi sosial di tengah masyarakat.

Pilkada Serentak 2024 di Riau menghadirkan tantangan tersebut. Meskipun secara umum situasi keamanan daerah relatif kondusif, lembaga penyelenggara pemilu telah mengidentifikasi berbagai bentuk kerawanan yang memerlukan langkah mitigasi sejak dini. Menurut Alnofrizal, pemetaan kerawanan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau menunjukkan bahwa selain politik uang, penyebaran hoaks, dan ketidaknetralan aparatur sipil negara, politik berbasis sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) termasuk dalam potensi pelanggaran yang perlu mendapatkan perhatian serius selama tahapan Pilkada 2024 (Riau, 2024).

Potensi konflik tersebut semakin meningkat seiring berkembangnya penggunaan media digital sebagai arena utama kampanye politik (Lim, 2002, 2017). Platform media sosial memungkinkan penyebaran informasi berlangsung secara cepat tanpa melalui proses verifikasi yang memadai. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa media sosial menjadi ruang yang sangat efektif bagi penyebaran ujaran kebencian, propaganda politik, maupun disinformasi yang mengeksploitasi identitas agama dan etnis. Algoritma media sosial juga cenderung memperkuat fenomena echo chamber, yaitu kondisi ketika individu hanya terpapar pada informasi yang memperkuat keyakinan kelompoknya sendiri. Situasi tersebut menyebabkan masyarakat semakin sulit menerima perspektif yang berbeda sehingga memperbesar peluang munculnya konflik sosial.

Kerawanan tersebut tidak hanya berdampak terhadap kualitas penyelenggaraan Pilkada, tetapi juga mengancam kohesi sosial masyarakat setelah proses pemungutan suara selesai. Konflik politik yang dibangun melalui politik identitas cenderung meninggalkan residu sosial berupa ketidakpercayaan antarkelompok, fragmentasi komunitas, bahkan konflik horizontal yang berlangsung lebih lama dibandingkan dengan masa kampanye itu sendiri. Oleh karena itu, upaya pencegahan konflik tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum dan pengawasan pemilu semata, melainkan perlu didukung oleh penguatan kapasitas masyarakat untuk memahami dan mengelola keberagaman secara konstruktif.

Sumanto Al-Qurtuby menegaskan bahwa pencegahan konflik jauh lebih efektif dibandingkan dengan penyelesaian konflik setelah kekerasan terjadi (Qurtuby, 2013). Pendidikan masyarakat melalui kegiatan pengabdian menjadi salah satu strategi preventif yang dapat memperkuat ketahanan sosial komunitas dalam menghadapi dinamika politik elektoral. Pengabdian kepada masyarakat memberikan ruang dialog antara akademisi, pemerintah, penyelenggara pemilu, tokoh agama, tokoh adat, organisasi kepemudaan, dan masyarakat untuk membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya menjaga kohesi sosial selama proses Pilkada berlangsung. Melalui pendekatan partisipatif tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi objek sosialisasi, tetapi juga aktor utama dalam membangun budaya demokrasi yang inklusif.

Berdasarkan kondisi tersebut, ISAIS UIN Sultan Syarif kasim Riau berkerjasama dengan APIP Riau menginisiasi serangkaian kegiatan pengabdian masyarakat bertema Bincang Diskursus Keragaman (Biduk) (Ansor et al., 2024, 2025). Kegiatan pengabdian kali ini berfokus pada mitigasi konflik bernuansa politik identitas melalui diskusi tata kelola keragaman dalam menghadapi Pemilihan Gubernur Riau 2024 dengan partisipasi kegiatan terdiri dari simpul elite civil society di Riau, seperti organisasi sosial keagamaan, organisasi paguyuban etnis, dan forum dialog lintas agama di Riau. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya politik identitas, memperkuat kemampuan

masyarakat dalam mengenali berbagai bentuk eksploitasi identitas di ruang publik maupun media digital, serta mengembangkan kapasitas masyarakat dalam mengelola keberagaman sebagai modal sosial untuk menjaga stabilitas demokrasi di tingkat lokal. Singkat kata, pengabdian ini tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai tata kelola keragaman, tetapi juga mendukung upaya preventif dalam meminimalkan potensi konflik sosial yang dapat muncul akibat politisasi identitas selama penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Riau 2024. Program ini diharapkan menjadi model penguatan ketahanan sosial berbasis literasi yang dapat direplikasi pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah di wilayah lain yang memiliki karakteristik masyarakat multikultural.

## METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini diselenggarakan melalui Kerjasama ISAIS UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia) Cabang Riau. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) sebagai strategi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada penguatan aset dan potensi lokal dalam membangun ketahanan sosial menghadapi potensi konflik bernuansa politik identitas pada Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2024. Pendekatan ABCD menempatkan masyarakat sebagai subjek utama perubahan melalui optimalisasi sumber daya, kapasitas, jaringan sosial, serta nilai-nilai lokal yang telah dimiliki, bukan berangkat dari pendekatan berbasis masalah (*needs-based approach*) (Afandi et al., 2022; Andyarini et al., 2020; Ansor & Masyhur, 2023). Dalam konteks pengabdian ini, aset yang dimaksud meliputi modal sosial berupa keberagaman budaya, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga pendidikan, komunitas lokal, serta praktik-praktik hidup berdampingan yang telah berkembang di masyarakat.

**Tabel 1. Partisipan Kegiatan Bincang Diskursus Keragaman**

| No. | Elemen Sosial<br>Kemasyarakatan | Keterangan Afiliasi (Jumlah peserta)                                                                                                                                      |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Organisasi sosial<br>keagamaan  | Muhammadiyah Riau (1), Nahdlatul Ulama Riau (1), Ahmadiyah (1), PERTI Riau (1), Al-Washliyah Riau (1), IKMI Riau (1), GP Ansor Riau (1), ISNU Riau (2), Muslimat NU Riau. |
| 2.  | Paguyuban etnis                 | PATRI Riau (1), FKPMR (1), IKSS Riau                                                                                                                                      |
| 3.  | Komunitas lintas agama          | FKUB Riau (2), Walubi Riau (1), Pemeluk Katolik Riau (1), Bahai Riau (2)                                                                                                  |
| 4.  | Akademisi/Mahasiswa             | UIN Suska Riau (5), UNRI (4), Unilak (1)                                                                                                                                  |
| 5.  | Pondok Pesantren                | Ma'had Ali al-Munawaroh (1)                                                                                                                                               |
| 6.  | Lainnya                         | AIPI Riau (4), ISAIS (4), ICMI Riau (1)                                                                                                                                   |

Sumber: Diolah dari daftar peserta (2024)

Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui lima tahapan utama yang mengadaptasi siklus ABCD, yaitu *discovery*, *dream*, *design*, *define*, dan *destiny* (Afandi et al., 2022; Andyarini et al., 2020; Masyhur et al., 2023; Salahuddin et al., 2015). Tahap pertama adalah *discovery* (pemetaan aset). Pada tahap ini tim pengabdian melakukan identifikasi terhadap aset sosial yang dimiliki masyarakat. Selain memetakan potensi lokal, tahap ini juga bertujuan mengidentifikasi persepsi masyarakat mengenai politik identitas,

bentuk-bentuk keragaman yang berkembang di lingkungan mereka, pengalaman menghadapi kontestasi politik sebelumnya, serta potensi kerawanan yang dapat memicu konflik sosial selama Pilkada. Hasil pemetaan menjadi dasar dalam penyusunan tema diskusi agar sesuai dengan karakteristik masyarakat sasaran dan kebutuhannya.

Tahap kedua adalah *dream* (merumuskan harapan bersama). Pada tahap ini dilaksanakan forum diskusi partisipatif yang melibatkan berbagai unsur masyarakat untuk membangun visi bersama mengenai penyelenggaraan Pilkada yang damai, inklusif, dan bebas dari eksploitasi politik identitas. Diskusi diarahkan untuk menggali pengalaman positif masyarakat dalam menjaga kerukunan sosial sekaligus mengidentifikasi nilai-nilai lokal yang dapat menjadi modal dalam memperkuat kohesi sosial. Melalui proses ini, masyarakat didorong membangun kesadaran kolektif bahwa keberagaman merupakan aset pembangunan yang harus dijaga bersama.

Tahap ketiga adalah *design* (perancangan program). Berdasarkan hasil pemetaan aset dan forum partisipatif, tim pengabdian bersama masyarakat partisipan untuk menyusun rancangan kegiatan literasi tata kelola keragaman. Tahap keempat adalah *define* (pelaksanaan program). Implementasi kegiatan dilakukan melalui metode ceramah interaktif, diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*), studi kasus, simulasi, dan pendampingan komunitas. Kegiatan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, akademisi, penyelenggara pemilu, serta organisasi masyarakat. Pendekatan partisipatif digunakan agar peserta tidak hanya menerima materi secara satu arah, tetapi juga berbagi pengalaman, mengidentifikasi potensi konflik di lingkungan masing-masing, serta menyusun strategi pencegahan berbasis komunitas. Pada tahap ini peserta juga memperoleh materi literasi tata kelola keragaman dalam bentuk modul edukasi sebagai bahan pembelajaran lanjutan.

Tahap terakhir adalah *destiny* (keberlanjutan dan evaluasi). Tahap ini bertujuan memastikan keberlanjutan hasil pengabdian melalui pembentukan komitmen bersama untuk menjaga kerukunan masyarakat selama tahapan Pilkada berlangsung. Evaluasi dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif melalui penyampaian pandangan untuk mengidentifikasi sejauhmana peningkatan pengetahuan peserta mengenai politik identitas, tata kelola keragaman, dan mitigasi konflik sosial. Ringkas kata, melalui penerapan pendekatan ABCD, pengabdian ini tidak hanya berorientasi pada penggalan pandangan masyarakat mengenai bahaya politik identitas, tetapi juga mendorong tumbuhnya kapasitas komunitas dalam memanfaatkan aset sosial yang dimiliki untuk membangun ketahanan demokrasi lokal. Dengan demikian, masyarakat diharapkan mampu menjadi agen perdamaian yang secara aktif berkontribusi dalam mencegah munculnya konflik bernuansa politik identitas selama penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2024 maupun pada kontestasi politik di masa mendatang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Proses Kegiatan dimulai dengan presentasi Alfitra Salam, Ketua AIPI Riau yang berperan sebagai pemantik diskusi. Proses diskusi difasilitasi Fitri Hedyanti, mantan anggota Pengawas Pemilu Riau, dan pada saat kegiatan ini berlangsung yang bersangkutan merupakan sebagai salah satu anggota AIPI Riau. Paparan Alfitra kemudian direspon sebagian peserta dengan mengemukakan pandangan-pandangannya terkait politik Identitas dari pelbagai aspeknya, mitigasi potensi konflik sosial, dan strategi tata Kelola

keragaman. Setelah Alfitra menyampaikan pemantik diskusi, partisipan diskusi yang mengemukakan pandangannya. Mereka antara lain adalah Chaidir dari FKPMR (Forum Pemuka Masyarakat Riau), Fakhrunnas MA Jabbar (PERTI, atau Persatuan Tarbiyatul Islamiyah Riau), Witra Yeni dari Muslimat NU Riau, Irfan Zulfikar dari Al-Washliyah Riau, Kong On dari Walubi Riau, Oliya dari Komunitas Bahai Riau, serta Agus Salim dari IKSS (Ikatan Keluarga Sulawesi Selatan). Uraian yang dipaparkan berikut ini merupakan disarikan dari pandangan yang dikemukakan yang bersangkutan dalam forum diskusi dimaksud.

Alfitra Salam menyampaikan bahwa konflik bernuansa politik identitas merupakan ancaman yang perlu diantisipasi sejak dini, terutama menjelang kontestasi politik elektoral seperti Pilkada Riau 2024. Menurutnya, keberagaman agama, etnis, budaya, dan latar belakang sosial yang dimiliki masyarakat Riau pada hakikatnya merupakan modal sosial yang memperkaya kehidupan masyarakat, bukan sumber konflik. Konflik muncul ketika identitas tersebut dimobilisasi sebagai instrumen politik untuk memperoleh dukungan elektoral melalui penyebaran narasi yang bersifat eksklusif, diskriminatif, dan memecah belah masyarakat. Oleh karena itu, politik identitas tidak boleh dipahami semata sebagai keberadaan identitas yang beragam, melainkan sebagai praktik politik yang mengeksploitasi perbedaan untuk membangun polarisasi sosial. Dalam pandangannya, masyarakat Riau memiliki pengalaman hidup berdampingan yang relatif harmonis sehingga potensi konflik dapat diminimalkan apabila seluruh elemen masyarakat mampu menjaga komitmen terhadap nilai-nilai toleransi dan persaudaraan.

Alfitra Salam menekankan bahwa strategi mitigasi konflik harus dilakukan melalui penguatan literasi tata kelola keragaman. Literasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemahaman mengenai pentingnya menghargai perbedaan, tetapi juga mencakup kemampuan masyarakat dalam mengenali dan menolak berbagai bentuk disinformasi, ujaran kebencian, serta provokasi berbasis identitas yang banyak beredar melalui media digital menjelang pemilihan. Dalam forum diskusi, ia menegaskan bahwa organisasi keagamaan, lembaga adat, paguyuban etnis, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah merupakan aset sosial yang memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya demokrasi yang inklusif. Sinergi antareleman tersebut diyakini mampu memperkuat kohesi sosial sekaligus membangun mekanisme pencegahan konflik yang bersifat partisipatif di tingkat masyarakat.

Senada dengan alfitra, Chaidir memandang bahwa politik identitas perlu ditempatkan secara proporsional dalam dinamika demokrasi lokal. Menurutnya, ekspresi identitas merupakan konsekuensi yang tidak dapat dipisahkan dari sistem demokrasi yang menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, politik identitas tidak serta-merta dipandang sebagai ancaman terhadap demokrasi, selama tidak dimobilisasi secara berlebihan untuk menciptakan permusuhan antarkelompok. Ancaman baru muncul ketika identitas digunakan sebagai instrumen politik yang menimbulkan eksklusivisme, polarisasi, serta menggeser substansi demokrasi dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat menjadi sekadar kompetisi antarkelompok. Dalam konteks Provinsi Riau, Chaidir menilai bahwa hubungan antarkomunitas selama ini relatif harmonis sehingga potensi konflik lebih banyak dipengaruhi oleh persoalan tata kelola pemerintahan daripada pertentangan identitas sosial.

Pandangan tersebut diperkuat dengan penjelasannya mengenai sejarah masyarakat Melayu yang sejak awal berkembang sebagai masyarakat terbuka. Menurut Chaidir, kawasan Melayu telah menjadi ruang perjumpaan berbagai kelompok etnis dan bangsa melalui aktivitas perdagangan sejak berabad-abad lalu. Interaksi yang berlangsung dalam waktu panjang mendorong terjadinya perkawinan antaretnis,



pertukaran budaya, dan penggunaan bahasa Melayu sebagai lingua franca di kawasan Nusantara. Pengalaman historis tersebut membentuk karakter masyarakat Melayu yang adaptif terhadap kehadiran pendatang dan terbiasa hidup dalam keberagaman. Oleh sebab itu, beliau menilai bahwa masyarakat Riau memiliki modal sosial yang kuat untuk menjaga harmoni sehingga politik identitas sulit berkembang menjadi konflik horizontal apabila nilai-nilai budaya Melayu tetap dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam diskusi tersebut, Chaidir juga menegaskan bahwa perjuangan yang selama ini dilakukan oleh Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) tidak diarahkan untuk membangun politik identitas yang eksklusif, melainkan memperjuangkan keadilan bagi masyarakat Riau dalam pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan daerah. Ia menjelaskan bahwa berbagai advokasi yang dilakukan FKPMR, termasuk dalam isu bagi hasil minyak, pengelolaan sumber daya strategis, maupun peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, berangkat dari tuntutan atas prinsip keadilan, bukan penolakan terhadap kelompok pendatang. Bahkan, menurutnya, masyarakat Melayu tidak pernah memosisikan pendatang sebagai lawan, melainkan menghendaki adanya kesempatan yang setara bagi seluruh warga dalam menikmati hasil pembangunan. Dengan demikian, isu yang diperjuangkan FKPMR lebih mencerminkan aspirasi terhadap pemerataan dan keadilan sosial daripada mobilisasi identitas etnis.

Chaidir mengaitkan upaya mitigasi konflik dengan penguatan nilai-nilai kepemimpinan dalam budaya Melayu. Ia menjelaskan bahwa tradisi Melayu mengajarkan agar masyarakat memilih pemimpin berdasarkan kemuliaan akhlak, integritas, kemampuan mengayomi, dan kebijaksanaan, bukan atas dasar kesamaan suku, asal-usul, maupun identitas primordial. Nilai tersebut, menurutnya, merupakan modal budaya yang sangat relevan dalam menghadapi Pilkada Riau 2024 karena mampu mendorong masyarakat menilai kandidat secara rasional berdasarkan kapasitas dan rekam jejaknya. Oleh karena itu, strategi pencegahan konflik bernuansa politik identitas perlu diarahkan pada revitalisasi nilai-nilai budaya Melayu, penguatan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan, serta pendidikan politik yang mendorong masyarakat memilih pemimpin berdasarkan kualitas moral dan komitmen terhadap kepentingan publik, sehingga demokrasi lokal tetap berlangsung secara damai, inklusif, dan berintegritas.



**Gambar 1.** Dokumentasi Pelaksanaan Bincang Diskursus Keragaman

Sementara itu Fakharunnas MA Jabbar dari PERTI Riau memandang bahwa politik identitas merupakan fenomena yang perlu dipahami secara kritis karena sering kali mengalami penyederhanaan makna dan manipulasi dalam ruang publik. Baginya, penggunaan istilah politik identitas kerap diarahkan untuk mendeligitimasi aspirasi masyarakat lokal yang sesungguhnya berangkat dari tuntutan keadilan sosial. Ia menyetujui pandangan bahwa politik identitas dapat dimanipulasi untuk kepentingan politik tertentu, tetapi menegaskan bahwa dinamika yang berkembang di Riau tidak dapat dilepaskan dari konteks historis masyarakat Melayu sebagai kelompok putra tempatan yang menghadapi perubahan struktur demografis akibat arus migrasi yang berlangsung sejak lama. Dalam pandangannya, kondisi tersebut telah menempatkan masyarakat Melayu pada posisi yang semakin minoritas di wilayahnya sendiri sehingga berbagai tuntutan mengenai peran putra daerah lebih tepat dipahami sebagai respons terhadap perubahan sosial dan distribusi sumber daya daripada sebagai ekspresi eksklusivisme etnis.

Senada dengan Chaidir, Fakharunnas menjelaskan bahwa sejarah masyarakat Melayu memperlihatkan karakter budaya yang sangat terbuka terhadap kehadiran kelompok pendatang. Sikap keterbukaan tersebut memungkinkan terjadinya proses asimilasi dan integrasi antaretnis yang memperkaya kehidupan sosial masyarakat Riau. Namun, pada saat yang sama, keterbukaan itu juga membawa konsekuensi berupa bergesernya penguasaan ruang ekonomi dan wilayah dari masyarakat lokal kepada kelompok-kelompok pendatang yang datang secara bertahap. Ia menggambarkan proses tersebut sebagai dinamika historis yang berlangsung melalui pembukaan lahan, pengembangan pusat-pusat ekonomi, hingga terbentuknya kawasan-kawasan permukiman baru yang akhirnya mengubah konfigurasi sosial masyarakat Riau. Oleh karena itu, menurutnya, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Melayu tidak dapat direduksi menjadi isu politik identitas semata, tetapi harus dianalisis melalui perspektif sejarah, antropologi, dan ketimpangan pembangunan agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perubahan struktur sosial di Riau.

Dalam konteks mitigasi konflik menjelang Pilkada Riau 2024, Fakharunnas menekankan pentingnya membedakan antara perjuangan memperoleh keadilan bagi masyarakat tempatan dengan mobilisasi identitas yang bersifat eksklusif. Menurutnya, aspirasi untuk meningkatkan peran putra daerah dalam pembangunan tidak seharusnya secara otomatis dikategorikan sebagai politik identitas yang mengancam demokrasi. Sebaliknya, pemerintah dan para pemangku kepentingan perlu memberikan ruang yang adil bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pembangunan, tanpa mengurangi hak-hak kelompok pendatang sebagai sesama warga negara. Ia juga mendorong agar persoalan marginalisasi masyarakat Melayu dikaji secara lebih mendalam melalui penelitian akademik sehingga kebijakan publik yang dihasilkan benar-benar didasarkan pada bukti empiris. Dengan demikian, strategi pencegahan konflik di Riau tidak cukup hanya melalui seruan menjaga toleransi, tetapi juga harus disertai upaya menghadirkan keadilan sosial, pemerataan pembangunan, dan pengakuan terhadap posisi masyarakat tempatan sebagai bagian integral dari masyarakat multikultural Provinsi Riau. Pendekatan tersebut diyakini mampu memperkuat kohesi sosial sekaligus mencegah eksploitasi isu identitas dalam kontestasi politik lokal.

Muslim Barus selaku perwakilan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Riau memandang bahwa politik identitas menjadi ancaman terhadap kehidupan demokrasi apabila identitas agama dijadikan instrumen untuk membangun eksklusivisme, mendiskreditkan kelompok lain, atau memperoleh keuntungan politik jangka pendek. Muslim menjelaskan bahwa pengalaman komunitas Ahmadiyah sebagai



kelompok minoritas memberikan pelajaran penting mengenai arti penghormatan terhadap hak setiap warga negara. Menurutnya, demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud apabila seluruh kelompok memperoleh ruang yang sama untuk menjalankan keyakinan, menyampaikan pendapat, dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat tanpa rasa takut maupun diskriminasi. Karena itu, ia menekankan bahwa pengelolaan keragaman harus berlandaskan prinsip kesetaraan, penghormatan terhadap martabat manusia, serta kepatuhan terhadap konstitusi dan hukum yang berlaku. Dalam pandangannya, apabila nilai-nilai tersebut dijaga secara konsisten, maka perbedaan identitas tidak akan berkembang menjadi sumber konflik, melainkan menjadi kekuatan yang memperkaya kehidupan sosial masyarakat.

Muslim juga menyoroti pentingnya membangun komunikasi yang berkelanjutan antarorganisasi keagamaan. Dialog lintas agama dipandang sebagai sarana efektif untuk menghilangkan prasangka, memperkuat saling pengertian, dan membangun kepercayaan antarkomunitas. Ia menilai bahwa forum-forum seperti diskusi yang diselenggarakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini perlu terus dikembangkan karena mampu mempertemukan berbagai kelompok yang selama ini memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda. Melalui dialog tersebut, setiap organisasi tidak hanya menyampaikan pandangannya, tetapi juga belajar memahami perspektif kelompok lain sehingga potensi kesalahpahaman dapat diminimalkan sejak dini.

Muslimat NU Riau, Witra Yeni menekankan bahwa pencegahan konflik bernuansa politik identitas tidak dapat dilepaskan dari penguatan peran perempuan, khususnya organisasi perempuan keagamaan, dalam membangun budaya damai di tengah masyarakat. Menurutnya, perempuan memiliki posisi strategis sebagai pendidik pertama dalam keluarga sekaligus sebagai agen pembentuk karakter yang mampu menanamkan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan penghargaan terhadap keberagaman sejak usia dini. Oleh karena itu, upaya mitigasi konflik menjelang Pilkada Riau 2024 tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan politik dan regulasi, tetapi juga harus menyentuh ruang-ruang sosial tempat nilai-nilai kebangsaan dan moderasi beragama ditransmisikan. Menurut Witra Yeni, keberagaman yang dimiliki masyarakat Riau harus dipandang sebagai kekuatan sosial, bukan sebagai sumber perpecahan. Menurutnya, perbedaan agama, etnis, dan latar belakang budaya merupakan realitas yang harus dikelola melalui dialog, kerja sama, dan sikap saling menghargai.

Irfan Zulfikar memandang bahwa pencegahan konflik bernuansa politik identitas harus dimulai dengan memperkuat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan yang moderat, inklusif, dan berorientasi pada persatuan bangsa. Menurutnya, agama pada hakikatnya mengajarkan persaudaraan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia sehingga tidak semestinya dijadikan instrumen untuk membangun polarisasi politik. Dalam konteks Pilkada Riau 2024, ia mengingatkan bahwa perbedaan pilihan politik merupakan konsekuensi dari kehidupan demokrasi yang harus disikapi secara dewasa tanpa mengorbankan hubungan sosial yang telah terbangun di tengah masyarakat. Oleh karena itu, tokoh agama dan organisasi keagamaan memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang mengeksploitasi sentimen agama maupun identitas kelompok tertentu.

Irfan Zulfikar menekankan bahwa upaya mitigasi konflik tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan keamanan, tetapi memerlukan kolaborasi seluruh elemen masyarakat melalui dialog lintas organisasi, peningkatan literasi politik, dan penguatan kesadaran kebangsaan. Ia berpandangan bahwa

forum yang mempertemukan organisasi keagamaan, paguyuban etnis, akademisi, dan pemerintah, sebagaimana dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, merupakan ruang strategis untuk membangun saling pengertian serta merumuskan komitmen bersama dalam menjaga kondusivitas daerah. Selain itu, ia mengingatkan pentingnya sikap kritis terhadap arus informasi di media digital karena penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan propaganda politik berbasis identitas berpotensi memperuncing perbedaan yang sebenarnya dapat dikelola secara damai.

Perwakilan Walubi Riau, Kong On, menegaskan bahwa keberagaman merupakan fondasi kehidupan masyarakat Riau yang harus dijaga melalui sikap saling menghormati dan penguatan nilai-nilai kemanusiaan. Menurutnya, perbedaan agama, etnis, dan latar belakang budaya merupakan realitas yang tidak dapat dihindari dalam masyarakat Indonesia, sehingga yang diperlukan bukanlah penyeragaman identitas, melainkan kemampuan seluruh elemen masyarakat untuk membangun komunikasi dan kerja sama yang harmonis. Dalam konteks Pilkada Riau 2024, ia mengingatkan bahwa kontestasi politik hendaknya tidak menjadi ruang untuk mempertentangkan identitas keagamaan maupun etnis, karena hal tersebut berpotensi merusak hubungan sosial yang telah terbangun dengan baik di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, setiap kelompok keagamaan memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi penyejuk dan mendorong umatnya mengedepankan etika, kebijaksanaan, dan kepentingan bersama dalam menyikapi perbedaan pilihan politik.

Kong On berpandangan bahwa pencegahan konflik memerlukan penguatan dialog lintas agama dan peningkatan literasi masyarakat dalam menyikapi informasi yang beredar di media digital. Ia menilai bahwa hoaks, ujaran kebencian, dan narasi provokatif berbasis identitas dapat dicegah apabila organisasi keagamaan terus membangun komunikasi, memperluas ruang dialog, dan mengembangkan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, Pilkada tidak hanya menjadi ajang kompetisi politik, tetapi juga momentum untuk memperkuat persaudaraan, toleransi, dan kohesi sosial sebagai modal utama dalam menjaga persatuan masyarakat Riau.

Senada dengan itu, Oliya dari komunitas Bahai Riau, memandang bahwa keberagaman merupakan kenyataan sosial yang harus diterima sebagai anugerah sekaligus menjadi fondasi dalam membangun kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis. Menurutnya, setiap agama mengajarkan nilai-nilai persaudaraan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia, sehingga perbedaan identitas keagamaan maupun etnis tidak seharusnya dijadikan dasar untuk membangun sekat-sekat sosial ataupun kepentingan politik yang eksklusif. Dalam konteks Pilkada Riau 2024, ia menekankan pentingnya membangun kesadaran bahwa perbedaan pilihan politik merupakan bagian dari proses demokrasi yang wajar dan tidak boleh mengurangi rasa saling menghormati antarsesama warga. Oleh karena itu, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga ucapan, sikap, dan tindakan agar tidak memperkeruh suasana melalui penyebaran narasi yang mengandung kebencian maupun prasangka terhadap kelompok lain.

Oliya menegaskan bahwa pencegahan konflik bernuansa politik identitas perlu dilakukan melalui penguatan dialog, pendidikan nilai-nilai kemanusiaan, dan kerja sama lintas komunitas. Menurutnya, forum diskusi yang mempertemukan berbagai organisasi keagamaan dan paguyuban seperti dalam kegiatan pengabdian ini merupakan ruang yang sangat penting untuk membangun saling pengertian, menghilangkan stereotip, serta memperkuat kepercayaan antarkelompok. Baginya, penguatan nilai persatuan umat

manusia, penghormatan terhadap keberagaman, dan kolaborasi lintas agama menjadi strategi utama dalam membangun ketahanan sosial masyarakat Riau sehingga perbedaan identitas tidak berkembang menjadi konflik, melainkan menjadi kekuatan untuk mewujudkan Pilkada yang damai, inklusif, dan berintegritas.

Agus Salim memandang bahwa isu politik identitas dalam konteks Riau perlu dibaca secara lebih kritis karena sering kali dimanfaatkan untuk mengalihkan perhatian publik dari persoalan yang lebih mendasar, yaitu ketidakadilan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam paparannya, ia mengingatkan kembali perjuangan masyarakat Riau pada periode 2006–2008 terkait tuntutan otonomi khusus dan peningkatan dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam. Menurutnya, tuntutan tersebut merupakan aspirasi yang lahir dari keinginan masyarakat Riau memperoleh keadilan atas kontribusi daerah terhadap perekonomian nasional. Namun, isu-isu tersebut kerap tenggelam ketika ruang publik lebih banyak disibukkan oleh perdebatan mengenai identitas etnis maupun agama. Agus Salim menilai bahwa politik identitas dalam kondisi tertentu sengaja dikonstruksi untuk menutupi tuntutan masyarakat terhadap distribusi sumber daya yang lebih adil, sehingga perhatian publik bergeser dari isu kesejahteraan menuju konflik identitas yang bersifat emosional.

Meskipun demikian, Agus Salim berpendapat bahwa politik identitas berbasis etnis maupun asal-usul daerah tidak memiliki daya mobilisasi yang kuat dalam masyarakat Riau. Menurutnya, masyarakat Riau telah berkembang menjadi masyarakat yang plural dan terbuka sehingga narasi yang mempertentangkan putra daerah dengan non-putra daerah atau Melayu dengan non-Melayu tidak lagi menjadi faktor dominan dalam menentukan pilihan politik. Akan tetapi, ia mengingatkan bahwa isu identitas tetap memiliki karakter yang sangat sensitif dan mudah diprovokasi apabila dimanfaatkan oleh aktor politik yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga ruang publik dari eksploitasi sentimen primordial, sekaligus mengarahkan perhatian masyarakat pada agenda-agenda substantif seperti pemerataan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Riau.

Sebagai strategi mitigasi konflik menjelang Pilkada Riau 2024, Agus Salim mendorong agar diskursus publik lebih diarahkan pada penguatan kesadaran kolektif mengenai hak-hak masyarakat Riau dalam memperoleh manfaat yang adil dari kekayaan daerahnya. Ia mencontohkan pernyataan Presiden mengenai besarnya kontribusi Pertamina Hulu Rokan terhadap penerimaan negara sebagai momentum yang seharusnya mendorong seluruh elemen masyarakat memperjuangkan peningkatan dana bagi hasil bagi Riau. Dialog yang melibatkan kalangan akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan paguyuban etnis perlu terus dikembangkan agar isu-isu strategis daerah tidak tertutup oleh polarisasi identitas. Dengan demikian, mitigasi konflik tidak hanya dilakukan melalui pengendalian narasi politik identitas, tetapi juga melalui penguatan kesadaran publik terhadap pentingnya keadilan sosial, tata kelola pemerintahan yang responsif, dan partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan daerah. Baginya, diskusi seperti ini tetap perlu diperluas, diperkaya, ditindak-lanjuti menjadi aksi bersama. Mereka merasakan manfaat diskusi seperti ini untuk membangun kesepahaman dan saling pengertian terhadap realitas keragaman di Riau, dan mitigasi konflik sosial dalam menghadapi momentum politik electoral terutama pemilihan kepala daerah Riau.

## KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat menyimpulkan terjadinya penguatan kesepahaman partisipan bahwa literasi tata kelola keragaman merupakan strategi preventif yang efektif dalam meningkatkan ketahanan sosial masyarakat menghadapi dinamika politik elektoral. Kegiatan ini berhasil mengoptimalkan aset sosial yang dimiliki masyarakat, khususnya jejaring organisasi keagamaan, paguyuban etnis, dan lembaga kemasyarakatan sebagai aktor strategis dalam menjaga kohesi sosial. Proses diskusi partisipatif memperlihatkan adanya kesamaan pandangan di antara para peserta mengenai pentingnya menolak eksploitasi identitas suku, agama, ras, dan antargolongan sebagai instrumen mobilisasi politik yang berpotensi menimbulkan polarisasi dan konflik horizontal. Selain itu, kegiatan ini juga meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya literasi digital dalam menghadapi penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan disinformasi politik yang semakin masif menjelang pelaksanaan Pilkada. Dengan demikian, pengabdian ini tidak hanya memperkuat kapasitas individu, tetapi juga membangun kesadaran kolektif bahwa keberagaman merupakan modal sosial yang harus dikelola secara inklusif untuk menjaga stabilitas demokrasi di tingkat lokal.

Kegiatan pengabdian ini menegaskan bahwa keberhasilan mitigasi konflik bernuansa politik identitas tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan regulatif melalui penyelenggara pemilu atau aparat penegak hukum, melainkan memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat sebagai bagian dari sistem peringatan dini terhadap potensi konflik sosial. Organisasi keagamaan, lembaga adat, paguyuban etnis, dan forum dialog lintas agama memiliki posisi strategis sebagai agen edukasi, mediasi, sekaligus penguat nilai-nilai toleransi, persaudaraan, dan tanggung jawab kewarganegaraan. Oleh karena itu, model literasi tata kelola keragaman yang dikembangkan dalam kegiatan ini layak direplikasi sebagai bagian dari pendidikan demokrasi berbasis masyarakat pada berbagai tahapan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah di wilayah multikultural. Ke depan, diperlukan penguatan kolaborasi yang lebih berkelanjutan antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal melalui program literasi demokrasi, penguatan moderasi beragama, serta pengembangan forum dialog lintas identitas agar kapasitas masyarakat dalam mencegah konflik sosial semakin kokoh. Dengan demikian, demokrasi lokal tidak hanya menghasilkan kompetisi politik yang sehat, tetapi juga mampu memperkuat persatuan, ketahanan sosial, dan harmoni kehidupan masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A., Laily, N., Wahyudi, N., Umam, M. H., Kambau, R. A., Rahman, S. A., Sudirman, M., Jamilah, Kadir, N. A., Junaid, S., Nur, S., Parmitasari, R. D. A., Nurdianah, Wahid, M., & Wahyudi, J. (2022). *Metodologi Pengabdian Masyarakat* (Suwendi, A. Basir, & J. Wahyudi (eds.)). Kementerian Agama.
- Ahyar, M. (2017). Islamic Clicktivism: Internet, Democracy and Contemporary Islamist Activism in Surakarta. *Studia Islamika*, 24(3), 435–468. <https://doi.org/10.15408/sdi.v24i3.4859>
- Akmaliah, W. (2020). When Islamism and Pop Culture Meet: A Political Framing of the Movie “212: The Power of Love.” *Studia Islamika*, 27(1), 1–33. <https://doi.org/10.36712/sdi.v27i1.9205>
- Andyarini, E. N., Oktorina, S., & Rosidi, H. (2020). Strengthening Self Capacity of ex-Localization of Prostitution Community at Bangunsari Surabaya for Economic Independence through Asset Based

- Community-Driven Development (ABCD) Approach. *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 278–297. <https://doi.org/10.29062/engagement.v4i2.293>
- Ansor, M. (2014). 'We are from the Same Ancestors': Christian-Muslim Relations in Contemporary Aceh Singkil. *Al-Albab*, 3(1), 3–24. <https://doi.org/10.24260/alalbab.v3i1.92>
- Ansor, M. (2016). Post-islamism and the remaking of islamic public sphere in post-reform Indonesia. *Studia Islamika*, 23(3), 471–515. <https://doi.org/10.15408/sdi.v23i3.2412>
- Ansor, M. (2024a). Aceh's Crescent and Star Flag: Negotiation of Collective Identity in Post-conflict Aceh vs Indonesia. *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik*, 1(2), 214–225. <https://doi.org/10.61787/h01y4d15>
- Ansor, M. (2024b). Kuasa Survey Dalam Politik Elektoral Indonesia: Studi Kasus Proses Rekrutmen Calon Kepala Daerah Pada Partai Golkar Di Riau. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(7), 157–173. <https://doi.org/10.62504/jimr768>
- Ansor, M., & Darwis, M. (2006). *Membangkitkan Otonomi Lokal: Dari Sejarah Pembentukan Kabupaten Rokan Hilir Hingga Implementasi Otonomi Daerah*. JSPDL.
- Ansor, M., & Masyhur, L. S. (2023). Satu kampung enam iman: Penguatan integrasi sosial melalui perayaan Tujuh Liku pada suku asli Anak Rawa di Siak, Riau. *Connection: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.32505/connection.v3i1.6242>
- Ansor, M., Masyhur, L. S., Hermanto, B., & Habibi, M. (2024). Penguatan Kemitraan Lintas Iman Muslim dan Baha'i melalui Bincang Diskursus Keragaman (BIDUK) #01 ISAIS UIN Sultan Syarif Kasim Riau. *Asskruie: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 46–56.
- Ansor, M., Pakpahan, S., Habibi, M., Masyhur, L. S., & Hermanto, B. (2025). Melawan Narasi Pekanbaru Intoleran: Penguatan Inklusivitas Beragama Melalui Dialog Pengalaman Puasa dalam Tradisi Lintas Agama dan Kepercayaan. *Connection: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 165–180. <https://doi.org/10.32505/connection.v5i2.12162>
- Appiah, K. A. (1994). Identity, Authenticity, Survival: Multicultural Societies and Social Reproduction. In A. Gutmann (Ed.), *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition* (pp. 149–163).
- Azhar, A., Gumpita, Ansor, M., Pakpahan, S., & Nurcahyadi. (2008). *Suara Pribumi: Respon Orang Sakai, Talang Mamak dan Duano terhadap Program Pemerintah*. The Riau Institute.
- Calhoun, C. (1994). *Social Theory and The Politics of Identity* (C. Calhoun (ed.)). Blackwell Publishers.
- Elfitra, E., Afrizal, A., & Zulfdesni, Z. (2019). Free, Prior and Informed Consent (FPIC) as a Conflict Mitigation Instrument: FPIC Applicability for Mitigation of Structural Agrarian Conflicts in Indonesia. *Proceedings of the International Conference on Social Sciences, Humanities, Economics and Law*. <https://doi.org/10.4108/eai.5-9-2018.2281040>
- Fraser, N. (2003). Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, and Participation. In J. Golb, J. Ingram, & C. Wilke (Eds.), *Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange* (pp. 7–109). Verso.
- Hadiz, V. R. (2019). The 'Floating' Ummah in the Fall of 'Ahok' in Indonesia. *TRaNS: Trans -Regional and -National Studies of Southeast Asia*, 7(2), 271–290. <https://doi.org/10.1017/trn.2018.16>
- Heryanto, A. (2014). *Identity and Pleasure The Politics of Screen Culture*. NUS Press.
- Khotimah, K., & Rosidi, I. (2020). Negotiating Piety and Radicalism: A Study Among Muslim Youth in Pekanbaru, Indonesia. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 8(3), 633. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v8i3.377>
- Lim, M. (2002). Cyber-civic space in Indonesia: From panopticon to pandemonium? *International Development Planning Review*, 24(4), 383–400. <https://doi.org/10.3828/idpr.24.4.3>
- Lim, M. (2013). Many Clicks but Little Sticks: Social Media Activism in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 43(4), 636–657. <https://doi.org/10.1080/00472336.2013.769386>



- Lim, M. (2017). Freedom to hate: social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411–427. <https://doi.org/10.1080/14672715.2017.1341188>
- Macapagal, M. E. J., Montiel, C. J., & Canuday, J. J. P. (2018). The Unifying and Divisive Effects of Social Identities: Religious and Ethnopolitical Identities Among Mindanao Muslims in the Philippines. *Journal of Pacific Rim Psychology*, 12, e28. <https://doi.org/10.1017/prp.2018.16>
- Masyhur, L. S., Hermanto, B., Palawa, A. H., Ansor, M., & Amin, M. Al. (2024). Penguatan Moderasi Beragama Guru Dan Penyuluh Agama Islam Riau Melalui Workshop Virtual Literasi Keagamaan Lintas Budaya. *Jurnal Widya Laksmi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 78–87. <https://doi.org/10.59458/jwl.v4i2.83>
- Masyhur, L. S., Hidayat, F. T., & Ansor, M. (2023). Pembinaan Kajian Fiqih Wanita dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an di Surau Gading Desa Rambah Samo Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. *Asskruie: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 41–52.
- Muhtadi, B. (2021). *Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mujani, S. (2008). *Muslim Demokrat: Islam, Budaya, Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*. Gramedia.
- Mujani, S. (2020). Religion and Voting Behavior: Evidence from the 2017 Jakarta Gubernatorial Election. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 58(2), 419–450. <https://doi.org/10.14421/ajis.2020.582.419-450>
- Mujani, S., Liddle, R. W., & Ambardi, K. (2012). *Kuasa Rakyat: Analisa tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru*. Mizan.
- Mujani, S., Liddle, R. W., & Ambardi, K. (2018). *Voting Behavior in Indonesia since Democratization: Critical Democrats*. Cambridge University Press.
- Osman, M. N. M., & Waikar, P. (2018). Fear and Loathing: Uncivil Islamism and Indonesia's Anti-Ahok Movement. *Indonesia*, 106(1), 89–109. <https://doi.org/10.1353/ind.2018.0016>
- Putrie, Y. E., Martokusumo, W., & Budi, B. S. (2020). Defending Spaces, Preventing Conflicts: The Politics of Identity Representation in the Nahdliyin Mosques in Malang Raya. *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM*, 14(1), 26. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2020.14.1.26-50>
- Riau, M. (2024). *Ini Kata Bawaslu Riau Soal Daerah Rawan Konflik Pemilu 2024*. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/797883/ini-kata-bawaslu-riau-soal-daerah-rawan-konflik-pemilu-2024>
- Rofieq, A., & Nuryono, R. (2016). Pengaruh Klientilisme terhadap Perilaku Pemilih Masyarakat Kecamatan Sukatani pada Pilkada Kabupaten Bekasi 2012. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(2), 105–117. <https://doi.org/10.15294/jpi.v1i2.6577>
- Salahuddin, N., Safriani, A., Ansori, M., Hanafi, M., Naili, N., Zubaidi, A. N., Safriani, R., Umam, M. H., Ilaihi, W., Taufiq, A., & Swasono, E. P. (2015). *Panduan KKN ABCD UIN Sunan Ampel Surabaya: Asset Based Community-driven Development* (Sulanam (ed.)). LP2M UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Sumaktoyo, N. G. (2021). Ethnic and Religious Sentiments in Indonesian Politics: Evidence from the 2017 Jakarta Gubernatorial Election. *Journal of East Asian Studies*, 21(1), 141–164. <https://doi.org/10.1017/jea.2020.35>
- Wee, V., & Chou, C. (1997). Continuity and Discontinuity in the Multiple Realities of Riau. *Bijdragen Tot De Taal-, Land- En Volkenkunde*, 153, 527–541.
- Zulkarnaini, Z., Ansor, M., & Masyhur, L. S. (2022). Sharia in power: non-Muslims and the performance of Islamic politics in Aceh public Sphere, Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 12(2), 257–283. <https://doi.org/10.18326/ijims.v12i2.257-283>